

## ABSTRAK

**M. Nur Setiyawan 1150030048:** *Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2021 Pasal 16 Ayat 1 Dalam Menanggulangi PMKS Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.*

Keberadaan pengamen, gelandangan, pengemis menimbulkan dampak yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman. Melihat banyaknya pengemis dan gelandangan di kota Bandung yang mengalami peningkatan, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah sosial yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran PMKS. Akan tetapi pasca adanya kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan karena masih banyak masyarakat yang kekurangan pendidikan, terlantar, terjerat hukum, dan lain sebagainya padahal dalam pasal 46 yang mengharuskan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat PMKS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan dan pembinaan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang PMKS sebagai upaya melakukan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori penerapan hukum dengan mengacu pada sistem hukum yang ada mulai dari struktur hukum (pemerintahan daerah/ aparat penegak hukum), substansi hukum (perda yang dijadikan bahan pembahasan), serta budaya hukum dengan menganalisis kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada undang-undang serta gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam menerangkan hasil penelitian penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan temuan yang didapatkan dan mengkomparasikan dengan teori yang ada.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 Dalam Menanggulangi PMKS masih belum maksimal karena tidak meratanya pendidikan terhadap masyarakat yang tergolong kurang mampu, banyaknya pendatang dan tidak memiliki identitas resmi seperti KTP dan KK sehingga penyaluran bantuan sosial tidak terpenuhi. Faktor pendukung penerapan Perda, yaitu adanya kegiatan rutin dalam oprasi gabungan yang dilakukan oleh satpopl PP dengan beberapa lembaga terkait. Faktor penghambat penerapan Perda yaitu tidak adanya efek jera bagi oknum PKMS karena kegiatan dijalan menjadi pilihan dalam melangsungkan hidup ditengah bayang-bayang kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah setiap kebijakan seorang pemimpin harus berdasar pada kemaslahatan ummat Perda Kota Bandung tentang PMKS ini merupakan bentuk serta upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat khususnya di wilayah Kota Bandung.

Kata Kunci : Peraturan Daerah; PMKS; Siyasah Dusturiyah

## ABSTRACT

**M. Nur Setiyawan 11530300048:** *Application of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2021 Article 16 Paragraph 1 in Overcoming PMKS in terms of Siyasa Dusturiyah.*

The existence of buskers, vagabonds, beggars have an impact that disrupts public order and peace. Seeing the increasing number of beggars and homeless people in the city of Bandung, the Bandung City Government issued a policy related to social problems in the form of the Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2009 concerning Public Order, especially in Article 16 paragraph (1) and (2) relating to prohibition and sanctions for PMKS violations. However, after the existence of the policy, it did not have a significant impact because there were still many people who lacked education, were neglected, ensnared by the law, and so on, even though in Article 46 which requires supervision and guidance to the PMKS community.

This study aims to determine and analyze the process of supervision and guidance in accordance with government policies, especially in Regional Regulation Number 9 of 2021 concerning PMKS as an effort to carry out public order and public welfare.

This study uses the theory of the application of law by referring to the existing legal system starting from the legal structure (local government / law enforcement officers), legal substance (perda which is used as a material for discussion), and legal culture by analyzing the legal awareness of the community.

This study uses a normative juridical method, namely research that emphasizes the law and social phenomena that exist in society. In explaining the research results, the writer uses descriptive analysis, namely by describing the findings obtained and comparing them with existing theories.

The results of the study show that the application of the Bandung City Regional Regulation Number 09 of 2019 Article 16 Paragraph 1 in Tackling PMKS is still not optimal due to the unequal distribution of education to people who are classified as underprivileged, the number of migrants and does not have an official identity such as KTP and KK so that the distribution of social assistance not fulfilled. The supporting factor for the implementation of the Regional Regulation is the existence of routine activities in joint operations carried out by the PP Satpohl with several related institutions. The inhibiting factor for the implementation of the Regional Regulation is the absence of a deterrent effect for the PKMS member because street activities are an option in carrying out life in the midst of the shadow of social inequality in society. In *siyasa dusturiyah*, every policy of a leader must be based on the benefit of the people. The Bandung City Regulation on PMKS is a form and effort of the government in realizing the benefit of the people, especially in the Bandung City area.

Keywords: Regional Regulations; PMKS; Siyasa Dusturiyah